

POTENSI HALAL TOURISM DI INDONESIA

Regina Dewi Hanifah

Perhotelan, Akademi Pariwisata Bunda Mulia

Email : rhanifah@bundamulia.ac.id

ABSTRAK

Pariwisata menjadi sektor bergengsi yang dapat mendongkrak ekonomi sebuah negara dalam sistem berkelanjutan. Dengan merebaknya Halal Lifestyle secara global, muncul pula Halal Tourism di negara-negara, khususnya negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Tentunya kesiapan Indonesia sendiri dalam menyiapkan diri menjadi destinasi untuk Halal Tourism dapat dikaji dari berbagai aspek, khususnya dalam aspek syar'i sendiri. Penelitian ini bertujuan melihat potensi Indonesia sebagai tujuan wisatawan dalam melaksanakan Halal Tourism. Dilihat dari faktor-faktor pendorong potensi wisata, faktor standar pengukuran Halal Tourism dari segi administrasi dan pengelolaannya serta tantangan yang dihadapi di Indonesia sendiri dalam melaksanakan Halal Tourism. Pariwisata halal di Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik sebagai bagian dari industri pariwisata nasional. Inti dari wisata halal menekankan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan pariwisata dan pelayanan yang santun dan ramah bagi seluruh wisatawan dan lingkungan sekitarnya.

Kata Kunci: Wisata, Halal, Indonesia

ABSTRACT

Tourism is a prestigious sector that can boost a country's economy in a sustainable system. With the proliferation of Halal Lifestyle globally, there is also Halal Tourism in countries, especially countries with a majority of Muslim population like Indonesia. Of course Indonesia's own readiness in preparing itself to be a destination for Halal Tourism can be studied from various aspects, especially in the aspect of syar'i itself. This study aims to see the potential of Indonesia as a tourist destination in implementing Halal Tourism. Judging from the factors driving tourism potential, Halal Tourism measurement standard factors in terms of administration and management and the challenges faced in Indonesia themselves in

implementing Halal Tourism. Halal tourism in Indonesia has good economic prospects as part of the national tourism industry. The core of halal tourism emphasizes the principles of shari'ah in tourism management and service that is polite and friendly for all tourists and the surrounding environment.

Keywords: Tourism, Halal, Indonesia

Pendahuluan

Halal Tourism dapat dikatakan pula sebagai wisata syariah sebagai salah satu sistem di sektor pariwisata yang khusus dibuat dan diperuntukkan bagi wisatawan muslim yang dalam pelaksanaannya tetap mematuhi aturan prinsip syariah. Konsep syariah telah menjadi tren dalam ekonomi global mulai dari produk makanan, minuman, keuangan dan gaya hidup. Sebagai tren baru gaya hidup banyak negara islam yang mulai menggunakan konsep baru ini sebagai sektor andalan mereka. Terdapat beberapa hal yang menjadi motor pertumbuhan pasar muslim secara global, yaitu demografi pasar muslim yang berusia muda dan berjumlah besar, pesatnya pertumbuhan ekonomi negara mayoritas muslim, nilai islam mendorong tumbuhnya bisnis dan gaya hidup islami, pertumbuhan transaksi perdagangan antara negara-negara Organisasi Konferensi Islam, partisipasi perusahaan multinasional, teknologi dan keterhubungan antar negara.

Sektor pariwisata merupakan area yang tahan terhadap krisis ekonomi, terlihat pada masa krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998, transaksi pada sektor pariwisata dianggap mampu menggerakkan perekonomian sampai unit yang paling kecil. Selain itu, secara global pariwisata menjadi tahan banting terhadap krisis juga dapat dilihat saat naiknya nilai tukar dollar, sektor ini tetap mengalami pertumbuhan. Hal tersebut didukung karena sektor ini sendiri mengeluarkan biaya yang sedikit jika dibandingkan dari hasil pendapatan, untuk melakukan promosi maupun pembangunan memerlukan biaya yang tidak banyak, lalu pariwisata menjadi tren baru sebagai gaya hidup, kemudian jumlah golongan menengah ke atas mengalami peningkatan karena mereka memiliki *spare income* untuk berwisata.

Untuk meningkatkan performa pariwisata Indonesia berbagai cara pun dilakukan dalam mewujudkan PDB pada tahun 2014 hanya 4,2 persen, diharapkan pada tahun 2019 mencapai 8 persen. Jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2014 yang hanya mencapai 9 juta orang dapat terwujud 20 juta wisatawan pada tahun 2019, dengan harapan devisa negara mencapai

Rp. 240 Triliun pada tahun 2019, yang hanya Rp. 120 Triliun pada tahun 2014. Salah satu caranya menambah segmen baru dalam pariwisata di Indonesia yaitu pariwisata halal untuk menambah keberagaman pariwisata, dan pariwisata halal ini untuk memberikan pelayanan kebutuhan dasar wisatawan muslim, wisatawan muslim menjadi target pasar karena menyumbang 12,5 persen dari jumlah total pengeluaran perjalanan wisatawan secara global. Pada 2019 Pemerintah Indonesia menargetkan kunjungan wisata bisa mencapai 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 wisatawan nusantara pada 2019. Wisatawan yang memiliki preferensi pariwisata halal sendiri diharapkan bisa mencapai lima juta orang pada 2019. Pada 2019 pula kontribusi sektor pariwisata diharapkan bisa mencapai 15 persen terhadap PDB Indonesia, menghasilkan devisa Rp 240 triliun, dan menciptakan lapangan kerja bagi 13 juta orang.

Pew Research Center Forum on Religion and Public Life menyebutkan pada tahun 2010 ada 1,6 Miliar penduduk Muslim di dunia dari 6 miliar orang dan pada tahun 2030 akan mencapai 2,2 Miliar penduduk Muslim dari 8,3 miliar di dunia. Pew Research Center juga membuat suatu kajian melihat perkembangan agama-agama besar yang ada di dunia untuk 40 tahun ke depan, hasilnya dilansir oleh kompas.com, agama Islam paling pesat mengalami perkembangan, pada tahun 2010 jumlah populasi umat Islam 1,6 Miliar dan diprediksikan pada tahun 2050 akan mencapai 2,76 Miliar. Sedangkan, agama Kristen pada tahun 2010 mencapai 2,17 Miliar umat, diprediksikan pada tahun 2050 akan mencapai 2,92 Miliar. Perbedaan ditahun 2050 nantinya inilah yang dapat menjadi landasan bahwa umat muslim terus meningkat dan menjadi market yang sangat potensial bagi sebuah negara dalam menjalankan pariwisata syariah atau halal tourism sebagai sektor baru bagi pendapatan sebuah negara. Berdasarkan data dari Global Islamic Economy Report di tahun 2014 adanya peningkatan secara global dari konsumen muslim pada makanan dan sektor gaya hidup sekitar USD 2.000.000.000.000 dalam 2013 yang tumbuh sebanyak 9.5% dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun peningkatan ini diharapkan dapat terus meningkat hingga USD 3.700.000.000.000 di tahun 2019. Adapun angka ini menjadi pasar yang potensial untuk makanan dan gaya hidup halal dapat berkembang kedepannya, dan menjadi tren di segala lini pariwisata.

Pemerintah Indonesia tentunya tidak ketinggalan dalam menggaungkan halal tourism di negerinya, dimana segala fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan ini dari mulai makanan, tempat tinggal dan masyarakat mulai dipersiapkan untuk dapat mendukung kegiatan halal tourism di Indonesia. Halal Tourism sendiri mulai dikenalkan pada tahun 2013 tepat pada kegiatan Indonesia Halal Expo 2013 & Global Halal Forum yang diadakan oleh Kementrian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tepatnya pada tanggal 2 November 2013. Wisata syariah tentunya bukan sebuah penghambat ataupun sebuah lawan bagi dunia pariwisata lainnya. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam berkembangnya pariwisata di sebuah daerah. Konsep wisata Syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Wisata Syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman (Tourism Review, 2013). Adapun nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata ini.

Dasar dari wisata ini sebenarnya adalah pemahaman makna halal di segala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan , hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri. Pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama didalam mengaplikasikan konsep wisata Syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai Syariah Islam seperti tidak adanya perjudian, sabung ayam maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Banyak wisatawan mancanegara, termasuk wisatawan muslim yang datang ke Indonesia untuk melihat indahnya pemandangan, sosial budaya masyarakat dan kekhasan daerah. Pasar wisatawan Muslim ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan berpotensi untuk terus dikembangkan menjadi pasar potensial. Mereka datang ke Indonesia tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi juga uang yang dibelanjakan cukup besar. Berdasarkan penuturan Dr. H. Sapta Nirwandar (wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) bahwa pada tahun 2012 uang yang dihabiskan wisatawan Muslim di Indonesia mencapai 126 miliar dolar AS, lebih besar dari seluruh uang yang dikeluarkan oleh wisatawan China yang mencapai 65 miliar dolar AS (Rp 630 triliun), Amerika Serikat yang mencapai 93 miliar dolar AS (Rp 902 triliun) atau wisatawan Jerman 111 miliar dolar AS (Rp1.077 triliun) (Indonesia Fokus Kembangkan Wisata Syariah, 2013). Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedy mengatakan, wisata halal muncul karena ada pasar yang membutuhkan. Bahkan, negara mayoritas non-Muslim pun tertarik menggarap sektor para pariwisata ini. Pariwisata halal pada dasarnya memperluas cakupan pasar. Karena itu, pelaku industri perlu memfasilitasi mereka. Wisata halal juga tidak untuk Muslim saja.

Tentunya kesiapan fasilitas dan masyarakat menjadi penentu utama dalam kesiapan sebuah daerah untuk menjadi tempat tujuan Halal Tourism, dan menjadi sasaran utama bagi Pemerintah untuk dapat meningkatkan kedua hal tersebut dalam mendukung program Halal Tourism yang ada. Indonesia dengan sejuta potensi tempat wisata yang dimiliki tentunya lebih mudah dibandingkan dengan negara lainnya untuk menjadi tempat wisata syariah, dimana negara Indonesia memiliki penduduk muslim yang lebih banyak hampir di setiap daerah wisata di Indonesia. Tak hanya dukungan dari segi jumlah muslim yang ada, tetapi dari budaya timur yang dimiliki oleh warna Indonesia yang bisa mendukung Halal Tourism dapat diterapkan lebih mudah. Kedua hal tersebut dipaparkan oleh Dr. H. Sapta Nirwandar dalam materi *Halal Lifestyle in Indonesia*.

Landasan Teori

Menurut Sirsang (dalam Budisusetio, 2004), pariwisata adalah kegiatan yang tidak sekedar untuk bersenang-senang atau melakukan perjalanan dan melepaskan diri dari rutinitas kerja namun selain itu dalam kegiatan tersebut juga terkandung banyak unsur marginalisasi terhadap pihak lemah melalui berbagai cara mulai dari yang bersifat soft, misalnya kerjasama manajemen internasional dan pinjaman dana investasi sampai pada pengusuran dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam buku "The Lawful and the Prohibited in Islam", yang ditulis oleh Sheikh Yusuf alQaradawi, seorang ulama Islam global yang dihormati dan ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional, Halal didefinisikan sebagai "yang diizinkan, sehubungan dengan yang tidak ada pembatasan, dan memberlakukan hukum dari Allah, dan diperbolehkan". Oleh karena itu, istilah halal berarti 'diperbolehkan' menurut ajaran Islam (hukum Syariah). Halal juga merupakan salah satu dari lima tindakan (al-ahkam alkhamsah) yang mengkategorikan moralitas tindakan manusia dalam Islam, orang lain menjadi Fard (wajib), Mustahabb (dianjurkan), Makruh (tidak menyukai), dan Haram (dilarang) (Faruki, 1966). Selain itu, definisi halal dieksplorasi dalam berbagai cara karena arti yang luas dari penggunaan bahasanya di Timur dan dalam konteks yang sempit juga digunakan di Barat. Untuk umat Islam, apa yang membuat halal atau diizinkan biasanya dikembalikan pada hukum Islam yang sebagian besar bersifat pasti dan tidak berubah, serta tidak seperti hukum sekuler. Syariah adalah sistem moral

hidup yang tidak terbatas pada persyaratan makanan yang boleh dikonsumsi dan terus berkembang dalam hubungannya dengan penduduk Muslim. Oleh karena itu, konsep halal itu penting untuk menjadi bagian dari merek (Ijaj, 2011).

Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam Islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawa konsekuensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa intangible value. Contoh produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim (Hamzah & Yudiana, 2015).

Islamic Tourism Center (ITC) memberikan definisi bahwa pariwisata islami adalah sebuah aktivitas, kegiatan, pengalaman atau kegemaran yang diselenggarakan dalam sebuah perjalanan wisata yang sesuai dengan seruan Islam dan dalam kerangka islami, misalnya: sejarah, seni, budaya, peninggalan sejarah, cara hidup, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan beberapa keinginan manusia lainnya (Islamic Tourism, 2011). Shakiry (2006) mengatakan bahwa konsep pariwisata islami itu tidak terbatas pada pariwisata religi, tetapi lebih luas dalam beberapa bentuk pariwisata kecuali pariwisata yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Sofyan, 2012). Konsep wisata Syariah dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban shalat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang olehNya (Kamarudin, 2013).

Halal Tourism adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kementerian Pariwisata, 2012). Halal Tourism dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama dengan produk, jasa, objek

dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Sehingga dapat dikatakan Halal Tourism tidak terbatas hanya pada wisata religi saja.

Perbedaan antara industri konvensional dan industri syariah sendiri dapat dilihat dalam tabel berikut:

	Syariah	Konvensional
Visi	Iman	Ideologi Komersial
Misi	Amal/Ibadah	Profesional Dalam Produksi
Metodologi	Syariah	Common Management Practice

Sumber: Sofyan, 2012

Dari tabel diatas dapat terlihat jelas perbedaan konsep perusahaan berbasis syariah dan konvensional. Disampaikan dalam tabel tersebut perbedaannya bermula dari visi dimana visi bisnis syariah adalah keimanan dengan misi melakukan segala sesuatu sebagai ibadah. Sedangkan untuk perusahaan konvensional melakukan visi dengan tujuan komersial sebuah produk dengan misi profesionalisme dalam produksi.

Metodologi Penelitian

Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan data kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder dari beberapa sumber yang relevan dengan tema artikel ini. Beberapa data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Analisa pengumpulan data ini bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis akan tetapi lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini analisis data dilakukan dengan memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis (Moleong, 2005). Dimana penulis menelusuri informasi yang bersumber dari media cetak dan elektronik dan literatur pariwisata tentang perkembangan wisata halal di dunia dan Indonesia. Lalu, mengumpulkan data berupa kebijakan pemerintah tentang pariwisata dan perkembangannya sampai dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, terakhir melakukan analisis dengan mendeskripsikan dan menafsirkan data.

Potensi Indonesia Untuk Halal Tourism

Indonesia memiliki banyak potensi dimana negara ini memiliki pemandangan alam yang bagus dengan 17.100 pulau tersebar serta 742 bahasa yang dimiliki. Hal ini merupakan potensi pariwisata yang sangat besar yang dapat dikembangkan bagi para wisatawan tentunya. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman agama dan budaya memiliki peninggalan sejarah dan tradisi yang terhubung dan tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek keagamaan dan praktik religi masyarakat. Warisan budaya dan agama dengan keragaman suku, etnis, bahasa, dan adat kebiasaan menjadi potensi dalam pengembangan pariwisata.

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya Indonesia sendiri mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk umat islam, dan juga sebagai pemilik destinasi pariwisata yang memiliki ciri khas berbeda-beda antar satu daerah dengan yang lainnya yang merupakan hasil dari perpaduan agama dan budaya dari masing-masing daerahnya. Budaya Indonesia sangat beragam. Budaya Melayu mendominasi Pulau Sumatra dengan nuansa religius dan berbagai peninggalan bersejarah. Budaya religius juga ada di Jawa, seperti Banten, Cirebon, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Demikian juga di Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan daerah lain. Di sisi lain, kuliner nusantara memiliki daya tarik yang diakui dunia, seperti rendang dan nasi goreng. Kuliner khas sering dinikmati saat kunjungan ke daerah dan sangat elegan dijadikan oleh-oleh. Beberapa keunggulan komparatif ini semestinya dioptimalkan untuk mendukung wisata halal nusantara.

Dengan banyaknya potensi tersebut Indonesia juga menargetkan pariwisata sebagai salah satu sektor yang akan terus berkembang hingga di tahun 2025 nanti, untuk dapat mendorong kegiatan ekonomi, dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kerja. Pemanfaatan keragaman pesona keindahan alam, dan potensi nasional sebagai wilayah dengan wisata bahari terbesar merupakan nilai tambah bagi Indonesia untuk dapat terus berkembang kedepannya.

Setelah tahun 2000 pariwisata internasional dibahas kembali dan menjadi salah satu bidang prioritas bagi negara-negara Organisasi Kerjasama Islam. Seiring dengan kemajuan pesat teknologi transportasi dan telekomunikasi, pariwisata internasional merupakan industri dengan pertumbuhan yang paling progresif dan lukratif hingga mampu menjadi kontributor untuk pendapatan nasional sebuah negara. Faktor tersebut menjadi penggerak negara-negara dunia Islam secara khusus, untuk membangun pariwisata yang ramah muslim sebagai tawaran alternatif salah satu segmen pariwisata internasional.

Pentingnya dikembangkan potensi wisata syariah disampaikan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat peluncuran Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di kawasan silang Monas, tanggal 17 November 2013. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai banyak alasan untuk mengembangkan potensi wisata syariah, antara lain keberadaan ekonomi syariah penting untuk mengurangi kerentanan antara sistem keuangan dengan sektor riil, sehingga menghindari penggelembungan ekonomi; menghindari pembiayaan yang bersifat fluktuatif, dan dapat memperkuat pengaman sosial. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan wisata syariah adalah mempersiapkan 13 (tiga belas) provinsi untuk menjadi destinasi wisata syariah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Namun dari ke-13 provinsi tersebut yang dinyatakan siap yaitu Jakarta, Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, dan Jawa Timur.



Gambar 4.1. Destinasi Wisata Syariah di Indonesia

Sumber: Kemenparekraf, 2013, Indonesia as Moslem Friendly Destination (Buku Panduan Wisata)

Ketua Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah (Ahsin) Riyanto Sofyan mengatakan bahwa, pariwisata syariah takkan berjalan tanpa dukungan pemerintah daerah. Beliau menegaskan, setiap daerah perlu membuat aturan yang bisa mendorong pemenuhan fasilitas

bagi wisatawan Muslim. Sejumlah daerah, ungkap dia, sudah mulai melakukan promosi wisata syariah. Sofyan mencontohkan Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Pemda Jawa Barat menyubsidi sekitar 3.000 sertifikasi halal untuk pelaku industri. Selain itu, Kota Bandung juga sedang berbenah untuk menjadi daerah wisata halal. Sayangnya, ada beberapa daerah yang belum sigap menjawab potensi luar biasa ini. Hal itu dinyatakan oleh Ketua Ahsin Jawa Tengah Heru Isnawan mengatakan, saat ini pemerintah daerah belum berencana mengembangkan wisata syariah. Tak heran, sektor swasta yang lebih cepat menangkap potensi besar ini.

Berdasarkan Global Muslim Travel Index Report, Kebutuhan wisatawan Muslim haruslah terjangkau hal tersebut dapat dicapai dengan melihat empat indikator yang menjadi tolak ukur daerah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim yaitu melihat populasinya, kemudian acara terkait wisata halal, adanya panduan dan pusat informasi untuk kemudahan wisatawan mengakses destinasi, dan terakhir adalah target promosi untuk menarik kunjungan wisatawan. Melihat populasi yang ada di Indonesia sendiri, tentunya mayoritas masyarakat adalah muslim yang berdampingan dengan masyarakat lainnya yang memeluk agama Hindu, Budha, Kristen dan Konghucu. Dari sisi acara atau event Halal yang diselenggarakan di Indonesia sendiri kini sudah banyak bermunculan event yang mengangkat tema Halal seperti International Halal Travel Fair.

Faktor pendorong pengembangan potensi obyek wisata berdasarkan Suwanto (1997) adalah kondisi fisik, aksesibilitas, kepemilikan, dan penggunaan lahan, hambatan dan dukungan serta faktor-faktor lain seperti upah tenaga kerja dan stabilitas politik. Di bawah ini akan disebutkan faktor-faktor pendorong potensi wisata yang saat ini sudah dimiliki oleh Indonesia untuk mendukung Halal Tourism, diantaranya:

Pertama, kondisi fisik berupa iklim, tanah, bantuan dan morfologi, hidrosfer, flora, dan fauna. Hal ini tak dipungkiri lagi Indonesia sudah memiliki semuanya dari ujung Sabang hingga Merauke. Kondisi fisik yang terbentang luas dengan kekayaan alam flora dan fauna yang ada menjadi sebuah tempat ideal untuk dapat dikunjungi bagi para wisatawan.

Kedua, atraksi dan obyek wisata yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu, misalkan tari-tarian, nyayian, kesenian daerah, upacara adat, dan lain sebagainya. Dengan budaya yang beragam tentunya hal ini sudah dimiliki oleh Indonesia dengan ragamnya budaya yang ada. Wisatawan dapat melihat keragaman tersebut didukung dari masyarakat sekitar yang tetap menjaga budaya adat istiadat tersebut tentunya.

Ketiga, aksesibilitas berkaitan dengan usaha pencapaian tempat wisata. Semakin mudah tempat tersebut dicapai maka semakin banyak pengunjung yang berminat datang. Hal ini terus ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia, dengan persiapan gerbang masuk dari seluruh dunia yaitu pembangunan bandara-bandara baru, serta infrastruktur dalam kota seperti kereta ataupun akses jalan yang memudahkan wisatawan untuk dapat menemui lokasi menarik yang sudah dimiliki oleh Indonesia.

Keempat, pemilikan dan penggunaan lahan dapat mempengaruhi lokasi tempat wisata antara lain lahan negara, lahan masyarakat dan lahan pribadi.

Kelima, sarana dan prasarana wisata seperti transportasi, biro perjalanan wisata, hotel atau penginapan dan rumah makan yang sudah sesuai dengan prinsip islami dan telah diukur dari segi administrasi dan pengelolaannya. Indonesia masih belum punya ketentuan secara khusus untuk sarana yang ada, baru ada beberapa Hotel Syariah saat ini yang sudah dirintis tetapi belum dapat stabil dikarenakan belum adanya ketentuan secara jelas mengenai prinsip ini untuk setiap *stakeholder* dalam Halal Tourism. Pemerintah sebaiknya bersiap untuk hal ini.

Sedangkan prasarana wisata adalah segala fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan yang beranekaragam. Dan terakhir, kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam mendukung Halal Tourism. Sebagaimana diketahui, Halal Tourism berbasis integrasi dengan masyarakat sekitar, berdasar prinsip-prinsip syariah. Bila prinsip ini tidak didukung oleh masyarakat maka konsep tersebut sulit dijalankan dan ditawarkan bagi para wisatawan dalam Halal Tourism. Saat ini kondisi tersebut masih sekadar masyarakat mayoritas muslim, tetapi belum sepenuhnya berprinsip islami secara holistik. Bila ingin berkembang lebih lanjut tentunya masyarakat harus dapat lebih sadar dalam menjalani prinsip syariah agar dapat memperkuat Halal Tourism di Indonesia.

Adapun analisis delapan faktor standar pengukuran Halal Tourism dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu :

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan

Untuk faktor ini tentunya kembali lagi kepada tipe pelayanan yang dimiliki oleh semua operator penyedia wisata halal yang ada di Indonesia. Dengan munculnya halal tourism yang berkembang di Indonesia tentunya membuat semua pemilik kepentingan yang

menyediakan halal tourism dapat menyesuaikan pelayanan yang diberikan kepada para wisatawan nantinya, sehingga dapat dikategorikan dalam pelayanan dengan prinsip muslim. Syarat dalam melakukan perjalanan pariwisata terdapat dua hal penting yang disyariatkan untuk muslim, pertama, seorang muslim harus mampu menampakkan keislamannya, kedua, tidak berpartisipasi dalam perkumpul maksiat dan acara yang diharamkan

Saat ini masih sedikit operator wisatawan yang mengedepankan prinsip muslim secara keseluruhan, dikarenakan belum adanya pengkhususan bagi market tersebut. Halal tourism saat ini masih dianggap sebagai salah satu market pendukung saja, bukan sebagai fokus market utama sehingga keseriusan akan hal ini masih belum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan dari beberapa operator wisata, ataupun penyedia akomodasi yang ada di Indonesia, yang masih belum terlihat memberikan prinsip muslim secara keseluruhan.

2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam

Untuk pemandu dan staf di Indonesia sendiri sebenarnya sudah menganut hal ini bila memang membawa wisatawan yang mayoritas beragama muslim, dimana para pemandu dan staf tentunya menghormati batasan-batasan yang ada dalam kepercayaan agama islam, baik dari sisi makanan, minuman, baik saat bertutur kata dan berperilaku. Hal ini didukung oleh adat timur yang masih kental dalam masyarakat Indonesia sendiri yang teradaptasi dari prinsip islam kebanyakannya. Sehingga tidak sedikit para pemandu dan staf sudah memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip islam. Prinsip islam saat ini yang telah digunakan lainnya adalah adab perjalanan yang telah dilakukan sebelum dan sesudah perjalanan yaitu dengan berdoa bersama sebagai bentuk peningkatan iman bagi wisatawan sehingga nilai-nilai islam dapat terus berjalan.

3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam

Dalam pengaturan semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsi islam tentunya merupakan sebuah hal yang tidak mudah. Hal ini dikarenakan sampai sejauh ini bila sebuah operator penyedia jasa untuk wisata tidak memfokuskan kepada wisatawan

muslim, tentunya masih ada beberapa hal yang dianggap merugikan bagi mereka, karena tertutupnya beberapa kegiatan yang diharuskan mengedepankan konsep dan prinsip islam. Tetapi hal ini dapat berhasil bila memang penyedia jasa sudah fokus dalam perusahaannya untuk dapat mengatur semua kegiatan tidak bertentangan dengan prinsip islam. Salah satunya adalah dengan memfokuskan pada waktu ibadah bagi wisatawan agar tidak terganggu untuk waktu shalat wajib dalam perjalanannya.

4. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

Berdasarkan Edrees(2010), dalam beraktivitas apapun termasuk dalam merancang, seorang arsitek muslim harus selalu berpegang kepada al-Qur'an dan as-Sunnah agar hasil rancangannya memberikan manfaat. Oleh karena itu, dalam merancang mestinya seorangarsitek mengacu kepada prinsip-prinsip di atas dalam merancang arsitektur. Prinsip-prinsip tersebut dapat kita temukan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam, sebagai berikut:

- a. Fungsi: Dimana karya arsitektur haruslah fungsional dan harus dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak menyebabkan mubadzir
- b. Bentuk: Bangunan mempunyai tampilan yang bagus tetapi tidak berlebihan
- c. Teknik: Bangunan harus memiliki stuktur yang kokoh dan kuat sehingga tidak membahayakan penggunanya
- d. Keselamatan: Rancangan tersebut mampu menjamin keselamatan penghuninya seandainya terjadi bencana/musibah apapun sebagai salah satu wujud ikhtiar
- e. Kenyamanan: Karya arsitektur harus mampu memberikan kenyamanan bagi penghuninya, sehingga penghuni selalu bersyukur atas kenikmatan yang diberikan
- f. Konteks: Karya arsitektur harus mampu menyatu dengan lingkungan dimana arsitektur tidak merusak lingkungan yang ada baik alam maupun buatan
- g. Efisien: Mewah dalam desain tetapi murah dalam pendanaannya sehingga menghindari kemubadziran

Oleh karena itu untuk dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip islam, bangunan yang dituju atau disediakan bagi wisatawan muslim haruslah sesuai dengan keenam aspek tersebut. Dimana hal ini dapat menjadi sebuah tambahan bagi studi kelayakan bangunan operator penyedia jasa yang terkait dengan Halal Tourism khususnya bagi penyedia akomodasi, makanan dan tempat ibadah dalam Halal Tourism. Untuk studi kelayakan berdasarkan prinsip islami masih sedikit dilakukan tetapi setidaknya

beberapa aspek umum sudah dilaksanakan disetiap studi kelayakan manapun seperti kenyamanan, keselamatan dan teknik yang dimiliki untuk membangun sebuah bangunan. Tinggal aspek konteks, bentuk, fungsi dan efisien yang harus diperhatikan lebih bagi setiap penggunaannya.

5. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal

Restoran dapat memperhatikan segi kehalalan dari setiap aspek. Segi kehalalan disini baik dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu pelayanan yang diberikan pun harus dalam standar kategori halal dan tidak melewati batas-batas prinsip islami. Saat ini masih sedikit restoran yang mengusung jasa pelayanan halal, dikarenakan masih belum adanya restoran dengan market wisatawan dari kategori Halal Tourism sendiri.

6. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi

Tidak hanya dalam market Halal Tourism tentunya aspek ini sudah menjadi point penting bagi semua wisatawan dalam melakukan perjalanan kemanapun. Sehingga untuk aspek ini Indonesia sudah dikatakan siap dalam memiliki keamanan untuk layanan transportasi yang telah disediakan.

7. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan

Untuk di Indonesia sendiri sudah tidak sulit menemukan tempat untuk melakukan kegiatan keagamaan, dikarenakan banyaknya penduduk sendiri yang mayoritas beragama muslim. Sehingga untuk aspek ini Indonesia sudah siap di beberapa tempat/daerah.

8. Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam

Tentunya tempat-tempat yang ingin dituju dalam berwisata tidaklah bertentangan dengan prinsip Islam dimana kemaksiatan tidak boleh terjadi di lokasi tujuan. Sehingga bagi para operator penyedia Halal Tourism haruslah dapat memilah tempat apa saja yang selaras dengan hal ini. Tentunya hal ini dapat bekerja sama dengan pengembang

objek wisata yang ada disetiap tempat untuk dapat memastikan hal ini sehingga dapat dipercaya dan membuat nyaman para wisatawannya. Kesulitan yang ada di Indonesia sendiri tujuan wisata biasanya tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan muslim, tetapi banyak wisatawan lainnya, yang kerap melakukan kebiasaan atau prinsip diluar Islam, sehingga hal ini yang harus dapat dipikirkan kembali oleh pemerintah memang bila ingin fokus ke dalam market Halal Toursim.

Untuk dapat menilai potensi dan kesiapan sebuah destinasi wisata khususnya untuk bidang pariwisata dibutuhkan penilaian kesiapan destinasi wisata yang dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

1. Produk Pengembangan Produk harus berdasarkan Kriteria Umum dan Standarisasi yang diterapkan untuk Usaha Pariwisata Syariah dan Daya Tarik. Kuliner khas daerah bisa menjadi salah satu produk pengembangan wisata syariah. Kehalalan produk di daerah tujuan wisata syariah mutlak diperhatikan. Inovasi untuk menjamin mutu dan keamanan produk mutlak dilakukan. Hal-hal kecil, terkait higienitas bahan dan proses produksi dapat diusahakan. Standardisasi kuliner unggulan daerah penting agar dapat menjaga cita rasanya. Beberapa kuliner khas yang populer dan mudah diolah di hotel dan restoran dengan bumbu-bumbu terstandar dari Indonesia perlu dipilih. Selain itu dari sisi akomodasi Hotel syariah menjadi prasyarat pengembangan wisata syariah. Hotel ini tak sekedar menyediakan tempat shalat dan restoran bersertifikat halal, namun mesti mampu melindungi pengunjung dari hal-hal mudarat atau kurang baik. Tidak harus setiap kamar ditempeli Ayat Kursi, yang terpenting justru layanan terbaik sesuai ajaran Islam. Pengelolaan hotel seperti ini justru menarik bagi Muslim dan non-Muslim yang mementingkan nilai-nilai kemanusiaan. Tak lupa untuk kebutuhan teknologi saat ini aplikasi tracking (penelusuran) wisata syariah penting dikembangkan. Informasi hotel, restoran, rumah makan, kuliner, dan produk unggulan lokal tersertifikasi halal di daerah tujuan wisata akan mudah didapat. Demikian juga objek wisata dan informasi cuaca. Aplikasi ini memudahkan wisatawan merencanakan perjalanan sesuai keinginan, waktu luang, dan anggaran sejak dari rumah dan menjadi pemandu perjalanan ketika di daerah tujuan wisata melalui smartphone.
2. SDM dan kelembagaan Kompetensi Profesi Insan Pariwisata Syariah juga harus ditunjang dengan Training dan Pendidikan yang sesuai dengan sasaran Standar Kompetensi yang dibutuhkan Wisatawan Muslim. Sumberdaya manusia mulai dari pengelola sampai kepada masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pengembangan destinasi wisata syariah

3. Promosi: Kemampuan pengelola pariwisata dalam menetapkan target sasaran dan menyediakan, mengemas, menyajikan paket-paket wisata serta promosi yang terus menerus sesuai dengan potensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan dalam mendatangkan wisatawan. Bentuk promosi dan jalur pemasaran disesuaikan dengan perilaku Wisatawan Muslim, World Islamic Tourism Mart (WITM), Arabian Travel Mart, Emirates Holiday World, Cresentrating.com, halaltrip.com, etc. Promosi wisata dari "mulut ke mulut" merupakan cara yang paling efektif untuk mendatangkan wisatawan. Hal itu dikatakan Direktur Promosi Pariwisata Luar Negeri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nia Niscaya. Beliau menyatakan yang paling murah dan efektif adalah menggunakan promosi dari mulut ke mulut, karena melibatkan interaksi dan kepercayaan dari orang yang pernah mengunjungi tempat itu.

Dari ketiga aspek tersebut Indonesia terus berusaha untuk dapat menjadi negara tujuan berwisata syariah atau lebih dikenal dengan Halal Tourism. Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Sertifikasi Usaha, dalam mengembangkan potensi dan standar pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai islami. Standar pariwisata syariah ini nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam wisata halal, destinasi yang ditunjuk wajib menyediakan makanan halal, memberikan akses yang mudah ke tempat ibadah, dan juga akomodasi, serta pelayanan yang sesuai standar syari'ah. Kementerian Pariwisata meluncurkan wisata halal di Indonesia dengan tujuan menjadikan Indonesia destinasi yang ramah bagi turis Muslim. Bukan hanya destinasi wisata, fasilitas yang menunjangnya harus sesuai standar halal dari MUI. Karena itu, wisata halal perlu dilakukan dan digerakkan pada agen-agen wisata agar bisa membawa wisatawan Muslim ke tempat yang ramah dan sesuai syari'ah.

Berdasarkan Dr. H. Sapt Nirwandar, tantangan Halal Tourism di Indonesia dimulai dari kebijakan yang dimiliki di Indonesia sendiri. Dari kebijakan tersebut berimbas kepada beberapa hal diantaranya:

1. Standar Akreditasi Sertifikasi: Dimana semua perusahaan yang mengedepankan konsep syariah harus dapat terakreditasi untuk menjawab kebutuhan para konsumen Halal Tourism di Indonesia. Bila Asesor atau Badan Penilai saja belum siap, maka tidak akan mungkin bagi perusahaan dapat terakreditasi. Ini pula yang menjadi tantangan bagi pihak asesor yaitu mengeluarkan standar syariah yang disetujui oleh semua pihak, dan

harus dapat dilihat dari seluruh perspektif, tidak hanya bagi perusahaan ternilai secara syariah, tetapi dari perspektif konsumen nantinya.

2. Kesadaran Promosi Pemasaran: Masih kurangnya promosi mengenai Halal Tourism akan berkembang dengan adanya kebijakan Halal Tourism nantinya bila telah dimiliki Indonesia, seperti di Thailand atau Korea yang menyediakan makanan halal bagi setiap wisatawannya. Dengan dipatenkannya kebijakan yang mendukung Halal Tourism diharapkan dapat menarik wisatawan muslim dalam menjalankan Halal Tourism di Indonesia.
3. Industri Penyedia Kebutuhan Halal: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan *Association of the Indonesia Tours and Travel* (ASITA). PHRI bisa memastikan hotel-hotelnya halal untuk wisatawan Muslim, sementara ASITA bisa membuat paket-paket wisata ke tempat wisata religidan ziarah yang sesuai dengna kebijakan yang nantinya dibuat oleh Pemerintah. Halal supply chain juga menjadi ujung tombak bagi penyedia kebutuhan halal. Dimana kebutuhan tersebut tentunya harus diperhatikan dalam prinsip syariah dan islami yang ada. Dimulai dari perkebunan, pabrik, distributor, retailer hingga restoran memiliki tantangan dalam penyiapan dalam prinsip islami.
4. Pembangunan Sumber Daya Manusia: Tentunya pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan yang cukup berat dalam mengembngkan Halal Tourism dimana sumber daya manusia yang ada haruslah dapat mengerti konsep syariah atau Halal secara holistik tidak hanya setengah-setengah, apalagi dalam implementasinya. Dukungan dari pemerintah mengenai hal ini dapat dituangkan dalam kebijakan yang nantinya dapat diterapkan oleh setiap perusahaan yang ada sehingga dapat menjadikan SDM nya sendiri sudah berbasis syariah. Training dan pembelajaran mengenai konsep halal dapat dijadikan sebuah cara untuk perusahaan dalam membangun sumber daya manusia berbasis syariah.
5. Ekonomi Bisnis: Fokus bisnis akan berubah begitu pula dengan ekonomi bisnis dalam Indonesia sendiri. Sebagai negara dengan basis mayoritas muslim terbesar di Asia Tenggara, Indonesia masih belum sercara resmi untuk mengharuskan seluruh perekonomian berbasis Halal/Syar'i. Hal ini dikarenakan Indonesia hidup dengan keberagaman etnik, budaya, dan agama yang ada. Sehingga bila fokus dengan Halal Tourism masih banyak beberapa bisnis yang belum siap untuk mengikuti prinsip tersebut dikarenakan marketnya tidak hanya wisatawan muslim saja.

6. Undang- undang Jaminan Produk Halal: Regulasi dibutuhkan dalam penetapan produk halal sehingga membuat wisatawan merasa aman terhadap produk yang ditawarkan dalam Halal Tourism
7. Riset Halal Center: Dengan adanya kebijakan halal tourism, dapat menjadi angin segar bagi dunia riset karena dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia dapat menjadi riset halal center sempurna. Dimana produk halal tentunya lebih mudah ditemukan dan dipasarkan nantinya di Indonesia.

Simpulan

Pengembangan halal tourism ini diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan dan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan wisatawan yang membeli produk atau pelayanan yang diberikan. Selain itu, pengembangan pariwisata syariah ini diharapkan mampu menghadirkan nilai-nilai kebaikan dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata, seperti: masyarakat, pengusaha dan wisatawan. Nilai-nilai kebaikan tersebut tidak hanya dipandang dari keuntungan ekonomi, tetapi juga nilai-nilai sosial budaya tetap terjaga dan terlestarikan. Hadirnya pariwisata syariah juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan, ketentraman dan keadamaian bagi Masyarakat di Indonesia, bahkan jauh dari perusakan lingkungan dan adat istiadat.

Pariwisata halal di Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik sebagai bagian dari industri pariwisata nasional. Industri wisata ini bertujuan bukan hanya memberikan aspek material dan psikologis bagi wisatawan itu sendiri, melainkan juga memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintah. Wisata halal ini tidak bersifat eksklusif, namun inklusif bagi semua wisatawan (Muslim dan Non- Muslim). Inti dari wisata halal menekankan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan pariwisata dan pelayanan yang santun dan ramah bagi seluruh wisatawan dan lingkungan sekitarnya.

Daftar Pustaka

Anonim. _____.*Menggerakkan Ekonomi Rakyat Melalui Sektor Pariwisata*, diakses dalam:<http://presidenri.go.id/pariwisata/menggerakkan-ekonomi-rakyat-melalui-sektor-pariwisata.html>

Anonim. _____.<https://travel.detik.com/read/2014/05/12/172600/2580505/1382/125->

pengeluaran-wisatawan-dunia-disumbang-traveler-muslim

Anonim. _____. Indonesia Fokus Kembangkan Wisata Syariah. Berita Satu. (Online), (<http://www.beritasatu.com/destinasi/91055-indonesia-fokus-kembangkan-wisata-syariah.html>)

Edrees, Munichy Bachroon. 2010. *Konsep Arsitektur Islami Sebagai Solusi Dalam Perancangan Arsitektur*. Journal of Islamic Architecture Volume 1 Issue 1 June 2010

Ijaj, A. 2011. Halal concept & brands. Retrieved from <http://halalbrands.blogspot.fi/>.

Kamarudin, L. M. 2013. Islamic Tourism: The Impacts to Malaysia's Tourism Industry. *Proceedings of International Conference on Tourism Development*, 397-405.

Karim, Sofwan. 2006. Etika Agama dalam Pembangunan Pariwisata. (<http://shofwankarim.wordpress.com/2006/08/18/etika-agama-dan-pariwisata>),

Kementerian Pariwisata. 2012. Kemenparekraf promosikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata syariah dunia. (<http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>)

Kettani, Housain. 2010. 2010 World Muslim Population. Proceedings of the 8th Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, January 2010

Moleong, Lexy, J.DR. 2005. Metode penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Reuters, T., & DinarStandard. 2014. State of the Global Islamic Economy 2014-2015 Report. Dubai: Dubai the Capital of Islamic Economy.

Sabri, Fahrudin Ali. 2010. Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia: Mengonsep Pariwisata Islami. *Karsa*. (Online), Vol. XVIII No. 2 Oktober, (<http://karsa.stainpamekasan.ac.id>)

Shakiry, A.S. 2008. Tourism halal imposing themselves little by little. (http://www.islamictourism.com/news_A.php/3838)

Sofyan, Riyanto Sofyan. 2012. Prospek Bisnis Pariwisata Syariah. Jakarta: Buku Republika.

Sri Anindiati Nursastri, 2014.12,5% Pengeluaran Wisatawan Dunia Disumbang Traveler

Muslim,

diakses

dalam

<https://travel.detik.com/read/2014/05/12/172600/2580505/1382/125-pengeluaran->

[wisatawan-dunia-disumbang-traveler-muslim,](https://travel.detik.com/read/2014/05/12/172600/2580505/1382/125-pengeluaran-wisatawan-dunia-disumbang-traveler-muslim)

Suwantoro, Gamal.1997.Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi Publishing